

## **BAB IV**

### **ANALISIS STRATEGI MENINGKATKAN KUOTA PEREMPUAN DALAM DPRD KOTA BANJARMASIN PERIODE 2019-2024**

#### **A. Gambaran Umum Partai di Kota Banjarmasin**

##### **1. PKS (Partai Keadilan Sejahtera )**

Partai Keadilan Sosial, yang lebih dikenal dengan singkatan PKS, secara resmi diumumkan pada tanggal 20 April 2002 di area lapangan silang Monas, Jakarta. Pada tahun yang sama, PKS juga memperoleh pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, PKS berhasil melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu tahun 2004.

Pada Pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera berhasil menjadi partai politik yang memenuhi syarat untuk bertarung dan berhak mengirimkan calon legislatif ke DPR dan MPR RI. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS menempatkan kader-kader terbaiknya sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Namun, pasca Pemilu dan Pilpres 2014, PKS kini berada di luar kendali Presiden Joko Widodo. Dalam DPRD Kota Banjarmasin, PKS konsisten bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Sejak ikut serta dalam Pemilu mulai 2004 hingga 2019, PKS selalu mencatatkan peningkatan persentase suara dengan perolehan di atas 7%, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami penurunan menjadi 6,79%.

Sebagai partai politik yang berakar dari nilai-nilai Islam, PKS bertujuan utama untuk merealisasikan keyakinan yang teratur dan menyalurkan aspirasi politik umat Islam dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Akar gerakan PKS berawal dari olah dakwah di kalangan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disebut tarbiyah dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an. Setelah berhasil menguatkan gerakan dakwah di lingkungan kampus dan masyarakat, tarbiyah kemudian melebar ke ranah politik. Pada tanggal 9 Agustus 1998, Partai Keadilan (PK) didirikan sebagai cikal bakal dari PKS. Kemudian, pada 20 April 2002 (9 Jumadil Ula 1423 H), Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada tanggal 21 Mei 2000, Hidayat Nurul Wahid terpilih menjadi Presiden PKS dalam Kongres Nasional Pertama Partai Keadilan yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Ia menggantikan Nur Mahmudi Ismail yang kemudian menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Namun, PKS menghadapi kendala dalam memasuki kancah politik karena terbentur aturan UU Pemilu yang menyebabkan PKS tidak dapat ikut serta dalam Pemilu 2004.

Dorongan kuat untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa membuat Musyawarah Majelis Syukro XII Partai Keadilan pada 17 April 2003 merekomendasikan penggabungan dengan kekuatan politik lain. Akhirnya, pada 20 April 2003, Partai Keadilan Sejahtera secara resmi

terbentuk melalui deklarasi yang dihadiri sekitar 40.000 orang di Silang Monas, Jakarta.

## **Visi dan Misi**

### **a. Visi Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Islam ini bertujuan untuk menjadi kekuatan yang solid dan terdepan dalam menjalankan tugasnya melayani rakyat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semangat membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat dan alam semesta.

### **b. Misi Partai Keadilan Sejahtera**

- 1) Kami bertekad untuk memperbesar jumlah anggota Partai sekaligus memperkuat integritas, rasa solidaritas, tingkat penerimaan masyarakat, serta profesionalisme. Komitmen kami adalah menghadirkan pemimpin bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak luhur.
- 2) Memperkuat kesatuan dan kekompakan Partai secara nasional dengan sikap mandiri dan terbuka, agar mampu menjalankan peran edukasi, advokasi, serta pengembangan kader kepemimpinan. Selain itu, kami akan mengimplementasikan sistem manajemen partai yang modern guna meningkatkan sinergi, performa, dan reputasi.
- 3) Meningkatkan peran pimpinan partai politik dalam hal pelayanan, pemberdayaan, dan keselamatan ketahanan

keluarga, generasi muda, kepentingan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Kami juga akan mendukung kemitraan strategis di berbagai bidang pelayanan guna meningkatkan mutu kehidupan yang berdaya saing, berdaya guna dan berhasil guna, serta berjiwa nasional.

- 4) Bertekad memenangkan Pemilu 2024 serta memperbesar peran partai dalam merancang dan mencegah kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan manusia, negara, dan bangsa. Kami juga mengabdikan diri untuk mengembangkan politik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta aktif berkontribusi dalam pengembangan demokrasi regional dan memperkuat kerja sama internasional guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global.<sup>36</sup>

## 2. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Asal-usul PDIP berawal dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI kemudian bergabung dengan beberapa partai lain, yaitu

---

<sup>36</sup> Partai PKS, “Visi Misi” [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pks.id/content/visidanmisi&ved=2ahUKEwitqKHNSvqOAxXowzgGHYT1BsYQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw3xteXhaPmYdmk\\_T6SnN8c9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pks.id/content/visidanmisi&ved=2ahUKEwitqKHNSvqOAxXowzgGHYT1BsYQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw3xteXhaPmYdmk_T6SnN8c9) (diakses pada 5 Juli 2025).

Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), serta Partai Katolik. Gabungan partai-partai tersebut akhirnya diberi nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973.

Sejak berdirinya, PDI kerap mengalami konflik internal yang semakin rumit akibat campur tangan pemerintah. Untuk meredam perselisihan ini, Megawati Soekarnoputri, putri kedua Ir. Soekarno, didukung menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI. Namun, pemerintahan Soeharto menolak dukungan tersebut dan melarang pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan ini bertolak belakang dengan keinginan mayoritas peserta KLB, sehingga Megawati akhirnya diangkat sebagai Ketum DPP PDI untuk periode 1993-1998 secara sah. Pada Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, konflik internal dalam PDI tidak kunjung mereda, hingga Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Pada tanggal 20 Juni 1996, pendukung Megawati menggelar demonstrasi yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan yang mengamankan kongres tersebut. Kemudian, pada 15 Juli 1996, pemerintah Soeharto secara resmi mengangkat Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.

Tindak lanjutnya, pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati mengadakan Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No. 56, Jakarta Pusat. Ketika itu, kelompok pro-Suryadi yang mengenakan kaus merah datang dan terjadi bentrokan dengan pendukung Megawati. Peristiwa ini dikenal sebagai Kerusuhan 27 Juli atau disingkat Kudatuli.

Setelah kejadian tersebut, di bawah kepemimpinan Suryadi, PDI hanya mampu meraih 11 kursi di DPR. Namun, setelah jatuhnya rezim Soeharto pada masa reformasi tahun 1998, kekuatan PDI di bawah Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Megawati ditetapkan kembali sebagai Ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres V di Denpasar, Bali.

Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 1 Februari 1999 agar bisa mengikuti pemilu. Perubahan nama ini disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan diumumkan secara resmi pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDIP mengadakan Kongres I pada tanggal 27 Maret hingga 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, dan menetapkan Megawati sebagai Ketua DPP PDIP untuk masa bakti 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali, yang diadakan pada 8-12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2015-2020.

## **Visi Dan Misi**

### **a. Visi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Visi Partai menggambarkan kondisi ideal di masa depan yang menjadi cita-cita Partai dan sekaligus menjadi panduan dalam setiap langkah perjuangan Partai. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai ini berperan sebagai:

- 1) Sebuah sarana perjuangan untuk membentuk serta mengembangkan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945;
- 2) Media perjuangan dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Ketuhanan, dengan semangat nasionalisme sosial dan demokrasi sosial (Tri Sila);
- 3) Instrumen perjuangan yang menolak segala bentuk individualisme sekaligus menghidupkan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sosial, bangsa, dan negara (Eka Sila);
- 4) Tempat berjalannya komunikasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan serta memperkuat partisipasi politik masyarakat; dan
- 5) Fasilitas untuk mencetak kader bangsa yang berperan sebagai pelopor, yang memiliki pemahaman mendalam serta

kemampuan mengimplementasikan ajaran Bung Karno dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

**b. Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Misi Partai merupakan inti dan jiwa yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi landasan pemikiran bagi kelangsungan eksistensi partai itu sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 7, 8, 9, dan 10 Anggaran Dasar Partai, yang dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 7 menyatakan tujuan umum partai, yaitu:

- 1) Merealisasikan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan sosial, berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi, serta berkarakter dan berbudaya.

Pasal 8 memuat tujuan khusus partai, yakni:

- a. Membangun gerakan politik yang berakar dari kekuatan rakyat demi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan sosial;
- b. Membangkitkan semangat, menyatukan tekad, mengorganisasi tindakan dan kekuatan rakyat, serta

membimbing dan mendidik rakyat agar sadar secara politik dan mengerahkan seluruh potensi dalam satu gerakan untuk meraih kemerdekaan politik dan ekonomi;

- c. Memperjuangkan hak-hak rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan spiritual seperti kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan;
- d. Berusaha mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai sarana untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- e. Menggalang solidaritas dan menjalin kerja sama internasional berlandaskan semangat Dasa Sila Bandung guna merealisasikan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 9 menyebut fungsi partai sebagai berikut:

- 1) Memberikan pendidikan dan meningkatkan kecerdasan rakyat agar bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara;
- 2) Melakukan rekrutmen anggota dan kader untuk ditempatkan dalam struktur partai, lembaga politik, serta lembaga publik;
- 3) Membentuk kader yang berjiwa pionir serta menguasai dan mengamalkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Mengumpulkan, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan;
- 5) Menggerakkan dan membangun kekuatan rakyat demi tercapainya cita-cita masyarakat Pancasila;
- 6) Membangun komunikasi politik berdasarkan esensi dasar kehidupan berpolitik dan mendorong partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 mengatur tugas partai, yaitu:

- 1) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara sebagaimana Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Melindungi, menyebarkan, dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan tujuan berbangsa serta bernegara;

- 3) Menjabarkan, menyebarluaskan, dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Mengumpulkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai ideologi Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan politik partai;
- 5) Memperjuangkan agar kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik negara;
- 6) Mempersiapkan kader untuk mengemban tugas politik dan jabatan publik; mengawasi dan mempengaruhi penyelenggaraan negara agar berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta prinsip TRISAKTI demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih, dan berwibawa;
- 7) Sebagai poros kekuatan politik nasional, partai wajib aktif menghidupkan semangat Dasa Sila Bandung untuk memperkuat konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.<sup>37</sup>

### 3. Demokrat

Partai Demokrat, yang sering disingkat PD, merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan secara resmi diakui pada 27 Agustus 2003. Partai Demokrat menempatkan diri sebagai partai tengah yang mengusung nilai nasionalisme dan religiusitas, dengan pandangan bahwa keberagaman identitas bangsa adalah sumber kekuatan bagi demokrasi.

Partai ini lahir dari inisiatif para intelektual dan akademisi. Pembentukan Partai Demokrat sangat erat kaitannya dengan upaya penyelamatan Indonesia dari dampak krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1998, sekaligus mendukung agenda reformasi. Dengan tujuan tersebut, Partai Demokrat memutuskan untuk mengajukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden tahun 2004. SBY turut aktif dalam proses perancangan platform hingga pembuatan logo partai. Keberhasilan Partai Demokrat dalam mendapatkan dukungan pemilih pada pemilu banyak dipengaruhi oleh pengaruh figur SBY, sehingga partai ini sangat identik dengan sosok Yudhoyono.

## **Visi Dan Misi**

### **a. Visi Partai Demokrat**

Partai Demokrat memiliki dua macam visi, yakni visi yang ditujukan bagi Indonesia dan visi internal partai itu sendiri. Visi untuk Indonesia menargetkan negara ini menjadi bangsa maju di abad ke-21, menjadi negara yang kuat pada tahun 2045, serta masuk dalam kelompok emerging economy pada tahun 2030. Sedangkan visi Partai Demokrat ke depan adalah untuk menjadi partai yang:

- 1) Memiliki kekuatan, integritas, dan kapasitas yang unggul.
- 2) Tetap relevan serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
- 3) Konsisten dalam menjaga nilai-nilai, idealisme, dan platform perjuangan yang menekankan pada perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi, serta pelestarian lingkungan.
- 4) Dekat dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan serta aspirasi mereka.
- 5) Mempertahankan identitas sebagai partai Nasionalis-Religius, terbuka, tengah, pluralis, dan pro terhadap rakyat kecil.

### **b. Misi Partai Demokrat**

Sebagai salah satu pilar politik di tingkat nasional, Partai Demokrat aktif berperan serta dan memberikan sumbangsih dalam kehidupan berbangsa serta pembangunan negara, dengan tujuan

mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, adil, sejahtera, dan demokratis. Sebagai partai politik, Partai Demokrat memegang visi dan misi sebagai berikut:

- a) Meraih kemenangan dalam pemilihan umum nasional, mencakup pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
- b) Memenangkan pemilu di tingkat daerah, baik untuk legislatif maupun kepala daerah.
- c) Mengembangkan dan mempersiapkan kader-kader Demokrat agar siap bertarung dalam pemilihan umum di pusat maupun daerah, baik dalam posisi legislatif maupun eksekutif.
- d) Menjalin hubungan komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat untuk memahami masalah, harapan, serta aspirasi mereka, yang kemudian diperjuangkan melalui berbagai tugas dan pengabdian partai.
- e) Menyelenggarakan kehidupan internal partai sesuai dengan ketentuan undang-undang serta anggaran dasar dan rumah tangga, demi membangun Partai Demokrat yang semakin

kokoh, modern, dicintai oleh rakyat, dan berperan signifikan dalam pembangunan nasional.<sup>38</sup>

#### 4. PAN (Partai Amanat Nasional)

Partai Amanat Nasional (PAN) lahir sebagai bagian dari gelombang reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh Amien Rais. Setelah berakhirnya era Orde Baru, Amien Rais bersama 49 anggota Majelis Amanat Rakyat (MARA) berkomitmen untuk meneruskan semangat perubahan tersebut. Pada saat itu, Amien Rais menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dan memiliki visi kuat untuk membangkitkan kembali Indonesia.

Untuk merealisasikan visi tersebut, Amien Rais membentuk sebuah partai politik baru yang kemudian dikenal dengan nama Partai Amanat Nasional (PAN). Awalnya, partai ini sempat diberi nama Partai Amanat Bangsa (PAB), namun dalam pertemuan yang berlangsung di Bogor pada 5-6 Agustus 1998, nama PAN dipilih kembali sebagai nama resmi.

Selain Amien Rais, tokoh-tokoh pendiri PAN mencakup Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli,

---

<sup>38</sup> Partai Demokrat “Visi Misi) <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.demokrat.or.id/visimisi/&ved=2ahUKEwitqKHNSvqOAxxXowzgGHYT1BsYQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw2qti4zheYtQJvSmnvav> (diakses pada 5 Juli 2025).

Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, serta Alvin Lie Ling Piao.

Deklarasi resmi pendirian PAN diselenggarakan pada 23 Agustus 1998 di Istora Senayan, Jakarta, di hadapan ribuan pendukung. Legalitas PAN didapatkan melalui pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM dengan nomor surat M-20.UM.06.08 tertanggal 27 Agustus 2003. Saat ini, posisi Ketua Umum PAN dipegang oleh Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dengan Eddy Suparno menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Totok Daryanto sebagai Bendahara Umum.

### **Visi Dan Misi**

#### **a. Visi Partai Amanah Nasional**

Terciptanya PAN sebagai partai politik unggulan yang berperan dalam membangun masyarakat madani yang sejahtera dan berkeadilan, dengan pemerintahan yang bersih dalam bingkai negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta mendapatkan ridha dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

#### **Misi Partai Amanah Nasional**

- 1) Menghasilkan kader-kader yang memiliki kualitas unggul.
- 2) Menjadikan PAN sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan selalu membela kepentingan mereka.
- 3) Membentuk PAN sebagai partai modern yang berlandaskan pada sistem dan manajemen terbaik serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa yang mulia.

- 4) Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, sejahtera, maju, mandiri, dan bermartabat.
- 5) Menyusun pemerintahan Indonesia yang bersih dan baik, melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan dan pendidikan bangsa.
- 6) Membentuk negara Indonesia yang utuh, berdaulat, bermartabat, aktif dalam menjaga ketertiban dunia dengan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan dihargai di kancah internasional.<sup>39</sup>

## 5. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerindra, singkatan dari Gerakan Indonesia Raya, secara resmi dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008. Partai ini muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat terutama kalangan bawah di Indonesia.

Awal mula terbentuknya Gerindra berasal dari inisiatif Fadli Zon bersama pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Keduanya menyadari dampak negatif dari kapitalisme yang merugikan rakyat kecil. Fadli Zon terpengaruh oleh ucapan Edmund Burke yang mengatakan, “satu-satunya hal yang diperlukan agar kejahatan menang adalah ketika orang baik tidak

---

<sup>39</sup> Partai PAN, “Visi Misi” <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pan.or.id/profilppid/visimisippid/&ved=2ahUKEwjJZSiuPqOAxVV1zgGHVCwPeAQFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw1jcN1YTIaeWtdXAAwbNh5l> (diakses pada 5 Juli 2025).

melakukan apa-apa.” Pemikiran ini memotivasi mereka untuk melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat bawah dari sistem kapitalis yang tidak adil.

Pada bulan Desember 2007, beberapa tokoh seperti Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, dan Haris Bobihoe berkumpul untuk membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta aturan dasar pendirian partai politik. Kesadaran akan pentingnya partai ini muncul mengingat adanya pemilu yang akan digelar pada tahun 2009.

Gerindra secara resmi berdiri pada tanggal 6 Februari 2008 dengan Prabowo Subianto sebagai ketua dewan pembina. Prabowo memberikan gagasan yang kemudian menjadi visi, misi, serta manifesto perjuangan partai. Misi utama Partai Gerindra adalah membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan berlandaskan ketuhanan, sesuai dengan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

### **Visi Dan Misi**

#### **a. Visi Partai Gerakan Indonesia**

Raya Partai Gerindra mengusung visi yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Visi tersebut juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta sistem politik negara yang berlandaskan nilai-nilai

nasionalisme dan religius. Selain itu, partai ini berkomitmen untuk menjaga kedaulatan politik, memperkuat identitas budaya, dan mencapai kemandirian dalam bidang ekonomi.

**b. Misi Partai Gerakan Indonesia Raya**

- 1) Menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- 2) Mengupayakan pembangunan nasional yang fokus pada ekonomi rakyat, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta distribusi hasil pembangunan yang merata untuk seluruh masyarakat, sambil terus mengandalkan kemampuan sendiri.
- 3) Mewujudkan kondisi sosial dan politik yang harmonis dalam masyarakat demi menjamin kedaulatan rakyat serta peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara.
- 4) Menjamin tegaknya supremasi hukum dengan mengutamakan prinsip praduga tak bersalah dan kesetaraan hak di hadapan hukum, sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang sosial.
- 5) Mengambil alih kekuasaan pemerintahan secara sah melalui mekanisme Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu

Kepala Daerah, guna membentuk kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih pada setiap jenjang pemerintahan.<sup>40</sup>

## 6. Golongan Karya (Golkar)

Golongan Karya (Golkar) berawal dari sinergi ide tiga tokoh penting, yakni Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya sudah mengemukakan konsep integralistik-kolektivistis sejak tahun 1940. Pada masa itu, ide mereka terwujud dalam bentuk Golongan Fungsional. Nama ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Sansekerta dan berubah menjadi Golongan Karya pada tahun 1959. Sampai saat ini, Golongan Karya dikenal luas dalam kancah politik nasional dengan sebutan Golkar.

Pada era 1950-an, pembentukan Golongan Karya awalnya ditujukan sebagai perwakilan dari berbagai kelompok di tengah masyarakat. Tujuan dari perwakilan ini adalah untuk mencerminkan representasi kolektif yang menjadi ciri khas sistem ‘demokrasi’ ala Indonesia. Bentuk ‘demokrasi’ inilah yang sering kali dikemukakan oleh Bung Karno, Prof Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara sebagai ideal.

Pada masa awal pembentukannya, Golkar tidak dibentuk sebagai partai politik melainkan sebagai perwakilan golongan melalui wadah Golongan Karya. Konsep utama Golkar pada awalnya adalah sebagai

---

<sup>40</sup>Partai Gerindra, “Visi Misi” <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://gerindra.id/visimisi/&ved=2ahUKEwitqKHNSvqOAxXowzgGHYT1BsYQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3Q8PVBgqrBwBvA26pH-dQM> (diakses pada 5 Juli 2025).

sistem representasi alternatif sekaligus dasar bagi lembaga-lembaga representatif. Organisasi Golkar mulai berdiri pada tahun 1957, ketika sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Sebagai sebuah alternatif, Golkar terdiri dari berbagai golongan fungsional.

Golkar juga memiliki misi membangun organisasi kemasyarakatan atau ormas. Perubahan Golkar menjadi sebuah partai politik terjadi saat Bung Karno sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berperan sebagai penggerak, bersama Angkatan Darat, mengubah Golkar untuk melawan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI)

Transformasi ini bertentangan dengan gagasan awal Golkar yang menolak keberadaan partai politik dan PKI yang memperjuangkan perbedaan kelas sosial. Golkar mengusung visi untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kerjasama antar golongan. Namun, akhirnya Golkar yang awalnya menentang partai politik justru berubah menjadi partai yang aktif dan bertahan hingga sekarang.

Sebelumnya, Partai Golongan Karya dikenal dengan nama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Partai ini lahir pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1964, dan digunakan oleh Angkatan Darat untuk mengimbangi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam arena politik.

Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak era Orde Lama, namun hadir sebagai kekuatan pembaruan politik pada masa Orde Baru. Pada Pemilihan Umum tanggal 3 Juli 1971, Sekber Golkar berhasil meraih 62,8% suara, yang berarti memperoleh 236 dari 360 kursi di DPR. Selain itu, mereka juga mendapatkan tambahan 100 kursi yang diisi oleh anggota yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pemilu tersebut, NU memperoleh suara sebesar 18,7%, PNI hanya 6,9%, dan Permusi (pengganti Masyumi) memperoleh 5,4%. Partai Golongan Karya, yang sebelumnya dikenal sebagai Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), didirikan secara resmi pada 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.

### **Visi Dan Misi**

#### **a. Visi Partai Golongan Karya**

Menciptakan bangsa Indonesia yang kokoh dalam persatuan, berdaulat penuh, berkembang maju, modern, damai, adil, sejahtera, beriman, dan berbudi pekerti luhur, dengan kesadaran yang tinggi terhadap hukum dan lingkungan, penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta mendapatkan kehormatan dalam interaksi dengan negara-negara lain di dunia.

### **b. Misi Partai Golongan Karya**

- 1) Memperkokoh dan melindungi Pancasila sebagai landasan negara sekaligus ideologi bangsa untuk memperkuat kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mengimplementasikan cita-cita proklamasi melalui pembangunan nasional di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang demokratis, berdaulat, sejahtera, serta makmur, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mewujudkan ketertiban serta perdamaian dunia.
- 3) Menciptakan pemerintahan yang efisien dengan menerapkan sistem yang baik, bersih, berintegritas, dan berlandaskan prinsip demokrasi.<sup>41</sup>

### **B. Deskripsi Lokasi dan Subjek Penelitian**

Pada bab ini membahas tentang pengolahan dan analisis data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan, Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumentasi sebagai metode pendukung untuk melengkapi informasi yang tidak diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini

---

<sup>41</sup> Partai Golkar, “Visi Misi” [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.partaigolkar.com/visidanmisi/&ved=2ahUKEwitqKHNsvqOAxXowzgGHYT1BsYQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw0hUUIVYCKV\\_ICKBpQHz](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.partaigolkar.com/visidanmisi/&ved=2ahUKEwitqKHNsvqOAxXowzgGHYT1BsYQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw0hUUIVYCKV_ICKBpQHz) (diakses pada 5 Juli 2025).

bersifat deskriptif kualitatif, dengan hasil yang diperoleh dari analisis data wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pelaksanaan kegiatan metode untuk mendapatkan data mengenai strategi partai-partai di Kota Banjarmasin meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang, Kantor Dewan Pimpinan Daerah, dan Kantor Fraksi Partai Politik Kota Banjarmasin. Lokasi tempat wawancara terdiri dari 6 tempat, karena ada 6 partai politik sebagai responden untuk mendapatkan data yang akurat. Tempat tersebut yaitu pertama, Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) yang berlokasi di Jalan Pembangunan 1 Nomor 26 RT 017/RW 002 Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70124. Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Fahruri, S.H sebagai Sekretaris DPD Partai PKS Kota Banjarmasin.

Kedua, Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) yang berlokasi di Jalan Pramuka Nomor 27 RT 12 Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70653. Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi dengan Bapak H. Muhaimin, S.H., M.H., M.Kn sebagai Ketua DPC PDIP Kota Banjarmasin.

Ketiga, Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat (DPC Demokrat) yang berlokasi di Jalan Sultan Adam Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70122 tetapi peneliti melakukan wawancara di Kantor DPRD Kota Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Lambung Mangkurat Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70114 dalam ruangan Fraksi Demokrat. Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Mohammad Kurniawan Putra, S. H. sebagai Direktur Eksekutif Cabang DPC Partai Demokrat Kota Banjarmasin.

Keempat, Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanah Nasional (DPD PAN) peneliti melakukan wawancara di Kantor DPRD Kota Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Lambung Mangkurat Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70114 dalam ruangan Fraksi Demokrat. Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Muhammad Dafik As'ad, S. E., MM. sebagai Tenaga Ahli Fraksi DPD Partai PAN Kota Banjarmasin.

Kelima, Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) yang berlokasi di Jalan Sutoyo RT 20 RW 02 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70116. Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Husaini sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Banjarmasin.

Dan keenam, Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Golkar) yang berlokasi di Jalan HKS N Komplek Perdagangan Ruko Blok B1-8 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70124. Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi dengan Bapak Syarifuddin Ardasa sebagai Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin.

Strategi partai politik harusnya menggunakan strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik adalah suatu strategi komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga yang dibahas jenis kegiatan komunikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Strategi meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin (studi kasus partai-partai di Di Kota Banjarmasin).

### **C. Deskripsi Hasil Penelitian**

Bab ini menguraikan proses pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan informasi. Selain itu, peneliti memanfaatkan dokumentasi sebagai metode pelengkap untuk melengkapi data yang tidak dapat dikumpulkan hanya melalui observasi dan wawancara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada hasil analisis wawancara dan dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Pelaksanaan metode kegiatan dalam penelitian ini mendapatkan data mengenai strategi meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin yang dilakukan partai-partai di Kota Banjarmasin.

Hasil wawancara dan dokumentasi analisis yang dilakukan peneliti dalam strategi partai-partai di Kota Banjarmasin meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin dilihat sesuai dengan teknik analisis data dan penyajian data yang peneliti sajikan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih fokus, menyederhanakan, dan menginformasikan data yang muncul dalam tulisan lapangan.

2. Penyajian Data

**Tabel 4. 1 Anggota DPRD Perempuan Kota Banjarmasin**

| No | Nama Anggota DPRD Perempuan 2014    | Pileg 2019                                        |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Hj. Ananda (Golkar)                 | Dicalonkan dan menang                             |
| 2  | Sri Nurmaningsih (Demokrat)         | Tidak dicalonkan                                  |
| 3  | Dewi Sanjaya (Demokrat)             | Dicalonkan di No. Urut 5 dan tidak terpilih       |
| 4  | Ratna Juita Rusmita Dewi (Demokrat) | Tidak dicalonkan                                  |
| 5  | Emma Chandra Herdinawati (Demokrat) | Tidak dicalonkan                                  |
| 6  | Rinda Herliani (PBR)                | Tidak dicalonkan                                  |
| 7  | Ismina Mawarni (PAN)                | Dicalonkan no. Urut 4 dan tidak terpilih          |
| 8  | Jumiati (PPP)                       | Dicalonkan no. Urut 1 dan tidak terpilih          |
| 9  | Yuria Wati Zai Rose (PKB)           | Dicalonkan no. Urut 6 dan tidak terpilih (Golkar) |
| 10 | Mahrta (PDIP)                       | Tidak dicalonkan                                  |

Dari data diatas menunjukkan bahwa 10 anggota DPRD perempuan Kota Banjarmasin pada periode 2014-2019 hanya 4 orang dicalonkan kembali ditingkat yang sama pada pemilu legislatif tahun 2019. Dari 4 orang tersebut

hanya 1 orang yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024. Adapun latar belakang terwakilan perempuan yang terpilih pada Pileg Periode 2019-2024 tersebut. Sebagai berikut ;

**Tabel 4. 2Latar Belakang Caleg Perempuan Terpilih Periode 2019-2024**

| <b>Periode2019-2024</b>                  | <b>Keterangan</b>                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hj. Ananda (Golkar)                      | Mantan Anggota Dprd Kota Banjarmasin 2014 dan Aktivis Politik |
| Hilya Auliya (Pkb)                       | Aktivis Politik                                               |
| Mudah, S. Ag (Gerindra)                  | Aktivis Sosial                                                |
| Hj. Siti Rahimah, S. E., M.M. (Gerindra) | Anggota Partai                                                |
| Norlatifah, S. E (Golkar)                | Mantan Anggota Dprd Kota Banjarmasin 2014 dan Berada (Kaya)   |
| Darma Sri Handayani ( Golkar)            | Aktivis Politik                                               |
| Dra. Hj. Sarifah Saqinah (Pan)           | Aktivis Sosial dan Pengusaha                                  |
| Amalia Handayani (Pan)                   | Anggota Partai                                                |
| Istiqamah, S.E (PAN)                     | Anggota Partai                                                |
| Hj. Mira Farialini, S. Pd., M.M ( Pan)   | Aktivis Politik                                               |
| Hj. Rinda Herliani, S.E (PAN)            | Aktivis Politik                                               |

Dari data ini di simpulkan bahwa partai mencalonkan orang-orang yang memang kuat, maksudnya sebagian besar orang yang sudah dikenal masyarakat, memiliki jabatan tinggi, dan memiliki dana yang cukup.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah dalam proses pengumpulan data peneliti telah melakukan verifikasi.

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada titik temuan berupa gambaran yang diteliti menjadi jelas. Setelah peneliti telah

yakin barulah menarik kesimpulan akhir dan gambaran mengenai “Strategi Meningkatkan Kuota Perempuan Dalam DPRD Kota Banjarmasin Periode 2019-2024”.

Berikut adalah data dari wawancara dan dokumentasi analisis. Sehingga menghasilkan kesimpulan tentang strategi meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024.

#### **1. Strategi partai-partai meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin Periode 2019-2024**

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa setiap partai memiliki strateginya masing-masing. Narasumber wawancara yang peneliti pilih adalah pengurus inti dari partai tersebut, ketua partai dan sekretaris yang berada untuk wilayah Kota Banjarmasin. Dari penjelasan Narasumber, peneliti mendapatkan beberapa pengetahuan dan informasi, dari beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Narasumber.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang ditetapkan KPU ada 30% yang tersedia untuk kuota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Dalam pemilihan umum diwajibkan adanya keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif dari partai, keseimbangan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin bersifat relatif. Bisa saja dalam satu pemilihan itu tidak ada perempuan karena tidak terpilih tapi saat menuju DPRD Kota Banjarmasin keterwakilan perempuan minimal 30% itu sudah diatur dalam undang-undang dan itu sudah dilakukan apabila tidak ada atau kurang dari 30% maka partai tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Partai memberikan

dukungan secara penuh memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki kepengurusan. Berawal dari lingkup kecil sehingga memberikan partai keyakinan untuk memberikan amanah menjadi perwakilan masyarakat yang mana sebelumnya juga diseleksi masyarakat melalui pemilu.

Partai telah mempersiapkan perempuan-perempuan terbaik dari partai mereka masing-masing, hanya saja semua itu tergantung dari pemilihan masyarakat karena kebanyakan masyarakat kurang yakin jika perempuan yang menjadi pemimpin. Masyarakat kurang yakin karena banyaknya peran perempuan dari lingkungan keluarga yang harus melayani suami dan anak, namun kenyataannya perempuan banyak yang mampu melakukan berbagai kegiatannya.

Strategi partai untuk memperkenalkan partai dan meyakinkan masyarakat dengan mengambil salah satu masyarakat untuk menjadi tim sukses dari partai. Kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan partai yaitu; a) melakukan kampanye, b) melakukan pembinaan-pembinaan, c) melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta d) rutin melakukan pendidikan politik terhadap anggota partai dan masyarakat.

Adapun sejumlah partai di Kota Banjarmasin mencalonkan perempuan yang dianggap kuat dalam Pileg 2019 untuk DPRD Kota. Kekuatan mereka ditopang oleh latar belakang politik yang solid seperti pengalaman sbagai anggota dewan, aktivisme politik atau status sebagai anak pengusaha sekaligus pimpinan partai yang memberi mereka akses

politik dan dukungan finansial yang memadai. Selain itu, sebagian partai juga memfasilitasi pertemuan antara calon perempuan dan pemilih perempuan selama masa kampanye berlaku.

Hal-hal tersebut sebagai catatan partai sehingga yang bersangkutan dapat dicalonkan. Tetapi tergantung mampu atau tidak turun ke masyarakat, bisa bersosialisasi ke masyarakat atau tidak, dan hal tersebut menjadi beban juga terkadang, tergantung dengan individunya, cara dirinya meyakinkan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada dirinya harus dipilih.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat keikutsertaan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin**

Faktor pendukung keikutsertaan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin:

### **a. Pendidikan dan Kesadaran Politik**

Akses yang lebih baik terhadap Pendidikan dan informasi politik dapat meningkatkan kesadaran Perempuan tentang hak-hak politik mereka dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam politik, termasuk mencalonkan diri di DPRD Kota Banjarmasin.

### **b. Kebijakan Afirmasi**

Kebijakan afirmatif, seperti kuota gender dalam pencalonan politik, dapat meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Beberapa negara menerapkan sistem kuota untuk

memastikan adanya keterwakilan Perempuan dalam posisi politik penting.

c. Dukungan Sosial dan Keluarga

Lingkungan sosial yang mendukung, termasuk keluarga yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, sangat penting. Dukungan suami atau keluarga dalam pembagian tanggung jawab domestik bisa memungkinkan Perempuan lebih fokus pada karier politik mereka.

d. Kesenjangan Gender dalam Masyarakat

Masyarakat yang lebih terbuka terhadap kesetaraan gender dan tidak menganggap bahwa politik adalah ranah laki-laki dapat menciptakan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi di DPRD Kota Banjarmasin.

Faktor penghambat keikutsertaan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin ada dua faktor hambatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, dilihat dari segi keaktifan perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena harus mengurus keluarga seperti suami dan anak. Hal tersebut yang membuat perempuan kurang aktif di masyarakat, Untuk melihat dan menilai kinerja dari anggota perempuan bahwa yang bersangkutan aktif dan kreatif, hal tersebut merupakan salah satu merekrut anggota yang dianggap layak untuk menjadi calon legislatif. Partai manapun akan memberikan dorongan sesuai dengan undang-

undang yang mangaturnya, tergantung pada partai memiliki kaderisasi perempuan yang dapat didorong atau tidak.

Faktor eksternal lainnya merupakan aktivis gerakan perempuan yang dapat mempengaruhi peningkatan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin. Masuknya aktivis perempuan dalam struktur partai politik memberikan pengaruh kepada partai untuk meningkatkan kuota perempuan dalam politikdi DPRD Kota Banjarmasin. Aktivis gerakan perempuan berperan dalam mempengaruhi partai politik untuk meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin. Gerakan perempuan internal partai (organisasi sayap partai) setiap partai memilikinya, seperti dalam bidang keagamaan dan bidang-bidang dikhususkan untuk perempuan yang diberikan wadah dari partai.

Selain dari calon legislatif itu sendiri dalam lingkungan masyarakat juga setiap daerah berpengaruh dengan kultural budaya di daerah tersebut. Personal calon legislatif memiliki kekurangan dan kelebihan. Sementara partai adalah organisasi politik yang sudah lama melekat pada masyarakat, semakin tua usia partai maka pemilih semakin banyak sedangkan semakin baru partai maka semakin sulit diterima masyarakat. Kecenderungan masyarakat memilih partai karena partai itu menghimpun yang dapat menjadi teladan mereka. Hal tersebut, tergantung pada latar belakang personal tetapi jika personalnya sulit diterima masyarakat maka tidak dapat dipaksakan, untuk mengetahuinya dengan cara survei personal jika hasilnya kurang maka dari partai juga tidak dapat memaksakan.

Upaya partai terhadap perempuan untuk meningkatkan kuota dalam pemilu sudah dilakukan secara penuh untuk memenuhi 30% minimal. Partai selalu mendukung dan lebih mengutamakan perempuan kegiatan yang juga memperhatikan kualitas diri mereka. Iya ada kriterianya perempuan maupun laki-laki dan diseleksi. Kriteria khusus tahu aturan, baik di masyarakat, aktif di beberapa organisasi, amanah, dan lain-lain. Dengan cara mengangkat aspirasi, kemudian disuruh maju untuk memperjuangkan itu. Iya mampu siapapun bisa, terbukti salah satunya adalah ketua fraksi Gerindra itu perempuan. Harus terjun ke masyarakat dan berjuang.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan tujuan penelitian pada bab I, sebagai berikut:

**“Mengetahui strategi partai-partai meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin Periode 2019-2024?” dan “Mengetahui faktor pendukung dan penghambat keikutsertaan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin?”.**

Partai politik mempunyai peran untuk meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin. Dari hasil pemilu 2019, dapat disimpulkan bahwa partai politik telah melakukan berbagai strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan tersebut dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor

eksternal. Adapun faktor internal yang telah partai politik lakukan yaitu peningkatan keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, rekrutmen dan kandidasi kader perempuan, dan ideologi partai politik.

Kebijakan partai politik melibatkan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebanyak 30% mempengaruhi kesempatan perempuan untuk terpilih. Kebijakan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Strategi partai untuk memperkenalkan partai dan meyakinkan masyarakat dengan mengambil salah satu masyarakat untuk menjadi tim sukses dari partai. Kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan partai yaitu; a) melakukan kampanye, b) melakukan pembinaan-pembinaan, c) melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta d) rutin melakukan pendidikan politik terhadap anggota partai dan masyarakat.

Untuk melihat dan menilai kinerja dari anggota perempuan bahwa yang bersangkutan aktif dan kreatif, hal tersebut merupakan salah satu merekrut anggota yang dianggap layak untuk menjadi calon legislatif. Partai manapun akan memberikan dorongan sesuai dengan undang-undang yang mangaturnya, tergantung pada partai memiliki kaderisasi perempuan yang dapat didorong atau tidak.

Partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum pada 2019 ada 16 partai politik. Dari 16 partai politik, ada 10 partai politik yang terpilih mendapatkan kursi secara keseluruhan sebanyak 45. Akan tetapi, peneliti hanya memilih 6

partai politik untuk diteiti. Pemilihan 6 partai politik tersebut, disebabkan banyaknya kursi yang didapatkan partai politik tersebut dan juga ketersediaan partai politik digali informasi melalui wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi data penelitian.

Berdasarkan analisis data yang bersifat deskriptif maka bagian ini akan peneliti uraikan wawancara dalam strategi meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024 bahwa :

1. Strategi partai-partai di Kota Banjarmasin meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin pada pemilihan umum 2019. Partai-partai memberikan wadah kepada perempuan sebagai pengurus partai terlebih dahulu. Setelah dianggap layak bagi partai menjalankan amanah, dari partai mendorong menjadikan anggota partai terutama perempuan sebagai calon legislaif (calon legislatif). Diwajibkan dari setiap partai 30% perempuan dalam pemilihan umum, apabila tidak terdapat perempuan maka partai tersebut tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum.

Strategi partai politik adalah mendorong perempuan untuk aktif bergabung dengan partai politik dan organisasi masyarakat. Ini membantu meningkatkan jumlah perempuan yang berkualitas dan berkualifikasi di bidang politik, mengatasi salah satu faktor internal penyebab rendahnya keterwakilan perempuan, yaitu terbatasnya jumlah perempuan mumpuni dalam politik. Partai politik juga dihimbau untuk secara proaktif melibatkan perempuan dalam setiap tahapan proses politik, mulai dari merekrut calon hingga penentuan kebijakan.

Adapun sejumlah partai di Kota Banjarmasin mencalonkan perempuan yang dianggap kuat dalam Pileg 2019 untuk DPRD Kota. Kekuatan mereka ditopang oleh latar belakang politik yang solid seperti pengalaman sbagai anggota dewan, aktivisme politik atau status sebagai anak pengusaha sekaligus pimpinan partai yang memberi mereka akses politik dan dukungan finansial yang memadai. Selain itu, sebagian partai juga memfasilitasi pertemuan antara calon perempuan dan pemilih perempuan selama masa kampanye berlaku.

Peningkatan kapasitas calon legislatif (calon legislatif) perempuan merupakan kebutuhan dan hak politik yang harus dipenuhi, serta merupakan implementasi dari kebijakan Affirmative Action. Pembekalan yang komprehensif, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertujuan untuk membekali calon legislatif perempuan dengan pengetahuan, sumber daya politik, dan pengalaman yang seringkali terbatas. Pembekalan ini meliputi aspek kognitif melalui pemberian pengetahuan dan wawasan dari narasumber, serta aspek psikomotorik melalui kelompok diskusi untuk menuangkan gagasan. Tujuannya adalah agar calon legislatif perempuan lebih siap dan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing memperebutkan kursi di lembaga legislatif.

Selain itu, pemberdayaan perempuan secara umum juga menjadi strategi penting. Hal ini mencakup peningkatan pendidikan politik bagi

masyarakat, khususnya perempuan, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pemilu yang jujur dan partisipasi perempuan dalam politik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, misalnya, secara rutin mengadakan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik.

Pentingnya peran politik dalam kebijakan afirmatif tindakan juga ditekankan, termasuk penegasan dan pembaharuan regulasi terkait kuota 30% keterwakilan perempuan. Beberapa pihak bahkan menyarankan adanya sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan komitmen partai politik terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Meskipun ada kemajuan, seperti jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Banjarmasin yang mencapai 14 orang dari 45 orang (24,44%) pada tahun 2020, yang mendekati persentase ideal 30%. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan untuk partai politik.

2. Adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan kuota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung yaitu suatu dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh partai sebagai bentuk dukungan kepada para calon legislatif. Sedangkan, faktor penghambat terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari diri calon legislatif sendiri dan keluarga, salah satunya dapat dilihat dari segi

keaktifan perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena harus berbagi waktu antara pekerjaan dengan mengurus keluarga seperti suami dan anak. Hal tersebut yang membuat perempuan kurang aktif di masyarakat. Faktor eksternal yaitu faktor dari masyarakat, salah satunya masyarakat belum begitu percaya dengan perempuan karena masih ada stigma di masyarakat bahwa laki-laki baik untuk menjadi pemimpin, hal tersebut yang menjadikan perempuan kurang dipeercaya masyarakat. Selain calon legislatif itu sendiri dalam lingkungan masyarakat juga setiap daerah berpengaruh dengan pemikiran dan kultural budaya di daerah tersebut. Faktor eksternal lainnya merupakan aktivis gerakan perempuan yang dapat mempengaruhi peningkatan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin. Masuknya aktivis perempuan dalam struktur partai politik memberikan pengaruh kepada partai untuk meningkatkan kuota perempuan dalam politik di DPRD Kota Banjarmasin. Aktivis gerakan perempuan berperan dalam mempengaruhi partai politik untuk meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin. Gerakan perempuan internal partai (organisasi sayap partai) setiap partai memilikinya, seperti dalam bidang keagamaan dan bidang-bidang dikhususkan untuk perempuan yang diberikan wadah dari partai.

Partai memiliki anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan didalam partai diberikan 30% keanggotaan perempuan disetiap partainya. Perempuan yang terjun ke politik merupakan seseorang yang siap berbagi waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, peneliti menganalisis bahwa strategi partai di Kota Banjarmasin yaitu menjadikan perempuan sebagai pengurus partai, memberikan diskusi politik yang diadakan dalam forum partai, dan memberikan wadah atau organisasi khusus perempuan di setiap partai.

Hasil analisis peneliti sebelum di lapangan, berdasarkan peneliti terdahulu untuk keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin belum mencapai 30%, namun sebagian partai ada yang mencapai bahkan lebih dari 30%. Sedangkan untuk di Kota Banjarmasin sendiri juga belum mencapai 30%.

Analisis data yang di lapangan yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun partai politik telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, hasilnya belum mencapai target yang diharapkan. Strategi yang dilakukan partai masih menghadapi hambatan signifikan, terutama dari faktor sosial dan budaya. Meskipun beberapa partai seperti PAN dan Golkar menunjukkan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan partai lain, secara keseluruhan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan afirmatif dan realisasi di DPRD Kota Banjarmasin.

| NO. | PARTAI   | KETERWAKILAN PEREMPUAN |
|-----|----------|------------------------|
| 1.  | GERINDRA | 2                      |
| 2   | PDIP     | 0                      |
| 3   | PKS      | 0                      |

|   |              |           |
|---|--------------|-----------|
| 4 | PAN          | 5         |
| 5 | GOLKAR       | 3         |
| 6 | DEMOKRAT     | 0         |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>10</b> |

**Tabel 1.4 Keterwakilan Perempuan**

Hasil data yang didapat dari narasumber partai untuk tahun 2019-2024 keterwakilan perempuan ada 10 orang yang mana hal tersebut jumlahnya tidak mencapai 30%.

Kesuksesan dalam meningkatkan kuota perempuan juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif perempuan itu sendiri dalam struktur partai serta dukungan yang diberikan oleh lingkungan sosial dan keluarga. Perlu adanya dorongan yang lebih besar dari partai dalam membangun kesadaran politik bagi perempuan agar lebih percaya diri dan memiliki akses yang lebih luas dalam dunia politik.

Partai politik sudah pastinya mendorong semua kadernya laki-laki maupun perempuan, tetapi untuk perempuan dorongan lebih lagi dari partai agar mereka bisa meningkatkan kuota perempuan. Semua upaya yang dilakukan partai terhadap kader perempuan sangat mendukung tinggal mereka sebagai kader perempuan berusaha mendekatkan diri pada masyarakat.

Hasil penelitian pada peneliti berupa data yang diperlukan, selanjutnya peneliti membuat analisis hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah di BAB I dan BAB II.

## **1. Analisis Strategi Partai-Partai Meningkatkan Kuota Perempuan Dalam DPRD Kota Banjarmasin Periode 2019-2024**

Setiap partai memiliki cara untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin. Semua dorongan dan dukungan partai berikan kepada perempuan yang lebih daripada laki-laki sebagai bentuk harapan yang besar partai kepada perempuan.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU, ada 30 % yang tersedia untuk kuota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Untuk memenuhi kuota 30 % dari KPU maka adanya perwakilan perempuan yang dijadikan calon dari partai karena diwajibkan untuk memenuhi dari setiap partai.

Masalah meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin menjadi strategi partai-partai di Kota Banjarmasin. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam demokratis. Dalam berpolitik status gender antara perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, meskipun seperti itu jumlah perempuan dalam pemilihan umum masih sedikit. Meningkatkan kuota perempuan di bidang politik dalam DPRD Kota Banjarmasin telah ditentukan dan diupayakan partai masing-masing dengan berbagai strategi yang dilakukan.

Di Indonesia meskipun pemerintah telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)

tetapi pemerintah Indonesia belum melaksanakan secara maksimal karena juga, negara merupakan pihak yang ikut melestarikan budaya patriarki dengan peraturan dan kebijakan yang belum memberikan keuntungan untuk perempuan. Sehingga perlu adanya gerakan untuk keadilan dan kesetaraan untuk perempuan di berbagai bidang.

Dengan masuknya perempuan dalam politik diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan. Hak politik perempuan dalam arti luas merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu aspek fundamental dari segala kerangka kerja demokratis.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, adanya kebijakan yang mana partai politik di dorong untuk mencalonkan paling sedikit 30% perempuan dalam pencalon legislatif. Dengan kebijakan tersebut bahwa mewajibkan perempuan secara aturan masuk dalam DPRD Kota Banjarmasin karena sistem pemilunya telah membantu perempuan untuk dapat bersaing dengan laki-laki.

Partai politik telah memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan yang dapat ikut dalam pemilihan umum tetapi masih belum memenuhi kuota 30% di DPRD Kota Banjarmasin.

Mensosialisasikan dari partai ke masyarakat guna melibatkan calon untuk andil di masyarakat. Di dalam kegiatan tersebut untuk calon perempuan diutamakan mensosialisasikan diri kepada ibu-ibu supaya

mereka lebih dekat. Oleh karena itu, partai memfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan bagi calon perempuan maupun laki-laki. Bagi anggota atau calon legislatif mencari masa pendukung sebanyak-banyaknya dengan turun ke masyarakat sehingga apabila terpilih atau tidak terpilih pemilih tetap di akomodir baik kegiatan maupun aspirasi tetap di dukung. Peminat perempuan kurang, meski di partai sudah memberikan motivasi sudah terpenuhi. Partai yang memberikan wadah untuk perempuan melakukan kegiatan. Perempuan harus bisa memotivasi agar perempuan-perempuan mau terjun ke politik, yang mampu menyuarakan, yang mampu menarik simpatik supaya posisi perempuan bisa di akomodir. Dari partai sudah berupaya bagaimana kualitas perempuan itu lebih dikenal masyarakat, terkadang tergantung individunya mau atau tidak turun ke lapangan tapi partai lain banyak perempuan yang terpilih. Karena itu yang berkualitas terbaik, berpengalaman bermasyarakat dan tergantung nasibnya.

Partai melakukan berbagai cara dan proses untuk memenuhi serta mencapai target mendapatkan kursi di DPRD Kota Banjarmasin. Keberhasilan mendapatkan kursi dalam DPRD Kota Banjarmasin maka perjuangan partai juga meningkatkan perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin melalui partai mereka.

Cara dan proses yang dilakukan partai untuk mencapai target perempuan masuk DPRD Kota Banjarmasin melalui partai mereka

merupakan strategi yang dilakukan partai yang bekerja sama dengan para calon legislatif perempuan. Partai memberikan segala upaya dan dukungan kepada calon legislatif terutama calon legislatif perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan harapan untuk meningkatkan kuota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin.

Partai menyiapkan calon legislatif perempuan terbaik yang dianggap layak menjadi calon legislatif yang bersedia mendatangi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Partai telah melakukan upaya, hanya saja tinggal mereka yang sudah diletakkan di calon legislatif dapat berusaha dan berupaya sehingga dapat terpilih itu yang menjadi ujian bagi mereka. Namun, terkadang perempuan memiliki keterbatasan waktu yang seharusnya di politik ini tidak ada batasan waktu di mana waktu malam juga bisa tetapi berbeda dengan perempuan yang terkadang memiliki batasan waktu. Adapun kriteria untuk menjadi calon legislatif dan anggota berbeda-beda dari masing-masing partai, yaitu tergantung kebutuhan partai. Dilihat dari kemauan pihak bersangkutan, loyalitas terhadap partai, yang bersangkutan memiliki kualitas diri, dan memiliki massa (dikenal di masyarakat). Apabila dirinya terpilih, maka mampu melaksanakan tugasnya dan dapat menyampaikan visi misi partai ke masyarakat.

Kemampuan perempuan sebagai calon legislatif yang utama untuk menarik dan meyakinkan masyarakat untuk mendukung. Pembuktian

calon legislatif yang paling utama sampai partai mendapatkan suara, adanya peluang partai memiliki kursi sehingga peluang juga untuk perempuan.

Pendekatan calon legislatif perempuan terhadap masyarakat harus dilakukan agar masyarakat yakin dan mengetahui visi misi dan siapa sosok yang akan mereka akan pilih. Bersosialisasi, dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah salah satu yang harus dilakukan biasa masyarakat nilai untuk mereka pilih sebagai pemimpin. Untuk melakukan pendekatan tersebut para calon legislatif harus memiliki program sebagai wadah agar mereka terpilih oleh masyarakat sebagai pemimpin yang amanah bagi masyarakat. Calon legislatif perempuan sangat diharapkan untuk meningkatkan kuota perempuan dalam DPRD Kota Banjarmasin, dengan tujuan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan perempuan yang ada, contoh seperti pelecehan yang terhadap perempuan dengan adanya perwakilan perempuan sebagai pemimpin dapat mengurangi terjadinya kejahatan tersebut melalui lebih penegasan aturan perlindungan terhadap perempuan.

Adapun sejumlah partai di Kota Banjarmasin mencalonkan perempuan yang dianggap kuat dalam Pileg 2019 untuk DPRD Kota. Kekuatan mereka ditopang oleh latar belakang politik yang solid seperti pengalaman sbagai anggota dewan, aktivisme politik atau status sebagai anak pengusaha sekaligus pimpinan partai yang memberi mereka akses

politik dan dukungan finansial yang memadai. Selain itu, sebagian partai juga memfasilitasi pertemuan antara calon perempuan dan pemilih perempuan selama masa kampanye berlaku.

## **2. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Keikutsertaan Perempuan Di DPRD Kota Banjarmasin**

Undang-undang sudah mengatur mengenai keterlibatan perempuan dalam politik terutama mengenai perempuan dalam pemilihan umum di DPRD Kota Banjarmasin. Negara telah melakukan upaya untuk perempuan dalam politik dengan adanya undang-undang untuk mengaturnya yang menetapkan 30% yang harus dipenuhi masing-masing partai politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245 yang berbunyi, “Daftar bakal calon sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Peraturan mengenai keterwakilan perempuan yang mewajibkan setiap partai memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dengan adanya peraturan tersebut menjadi peluang besar bagi perempuan untuk menjadi keterwakilan perempuan. Negara telah mendukung dengan menetapkan peraturan tersebut sebagai bentuk memberi peluang dan menaikkan derajat perempuan tanpa batasan dalam politik. Semua kebijakan diatur didalam undang-undang tersebut, peningkatan perempuan didalam politik semakin meningkat dan sebagai keterwakilan

juga selalu meningkat dengan harapan peningkatan tersebut selalu bertambah tidak berkurang.

Faktor pendukung keikutsertaan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin:

a. Pendidikan dan Kesadaran Politik

Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan informasi politik dapat meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak politik mereka dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam politik, termasuk mencalonkan diri di DPRD Kota Banjarmasin sehingga memperkuat kepercayaan diri mereka dalam pengambilan keputusan.

Pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman perempuan dalam hak-hak politik dan partisipasi mereka dalam proses politik. Pentingnya sosialisasi mengenai keterwakilan perempuan melalui berbagai media, baik konvensional atau digital. Keterwakilan perempuan dapat menghasilkan keputusan yang lebih akomodatif dan responsive terhadap kebutuhan perempuan.

b. Kebijakan Afirmasi

Kebijakan afirmatif, seperti kuota gender dalam pencalonan politik, dapat meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Beberapa negara menerapkan sistem kuota untuk memastikan adanya keterwakilan Perempuan dalam posisi politik penting.

Kuota gender, seperti kuota 30% untuk perempuan, bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan suara perempuan terwakilkan dalam pengambilan keputusan politik. Pentingnya adanya kebijakan afirmasi, kebijakan afirmatif membantu meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi politik yang sebelumnya mungkin terpinggirkan dan dengan adanya kuota perempuan didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Kebijakan ini berfungsi untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, seperti budaya patriarki dan kurangnya dukungan dari partai politik.

c. Dukungan Sosial dan Keluarga

Lingkungan sosial yang mendukung, termasuk keluarga yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, sangat penting. Dukungan suami atau keluarga dalam pembagian tanggung jawab domestik bisa memungkinkan perempuan lebih fokus pada karier politik mereka.

Lingkungan sosial yang positif, termasuk dukungan dari keluarga, dapat memberikan dorongan emosional yang diperlukan bagi perempuan untuk mengejar karier politik. Rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi sangat penting dalam menghadapi tantangan di dunia politik. Keluarga yang mendukung akan memberikan

kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti menghadiri pertemuan, kampanye, atau diskusi publik.

Ketika perempuan dalam keluarga atau komunitas terlibat dalam politik, mereka dapat menjadi model peran yang menginspirasi perempuan lain untuk mengikuti jejak mereka. Ini menciptakan siklus dukungan yang positif.

d. Kesetaraan Gender dalam Masyarakat

Masyarakat yang lebih terbuka terhadap kesetaraan gender dan tidak menganggap bahwa politik adalah ranah laki-laki dapat menciptakan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi di DPRD Kota Banjarmasin.

Masyarakat yang tidak menganggap politik sebagai ranah laki-laki dapat membantu membongkar stereotip gender yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam politik. Ketika perempuan dipandang sebagai pemimpin yang setara, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi. Masyarakat yang mendukung kesetaraan gender sering kali memiliki program pendidikan dan kampanye kesadaran yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik.

Dalam masyarakat yang mendukung kesetaraan gender, perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang politik, seperti pencalonan dalam pemilihan umum, posisi kepemimpinan

dalam partai politik, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk kampanye. Masyarakat yang terbuka terhadap kesetaraan gender cenderung memberikan dukungan kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik, baik melalui jaringan sosial maupun dukungan finansial.

Partai telah matang dalam mempersiapkan para calon legislatif, untuk menjadikan sebagai calon legislatif partai telah melakukan berbagai tahapan sebagai langkah untuk melakukan penyeleksian keanggotaan agar terpilih calon legislatif-calon legislatif yg dianggap terbaik dari partai. Calon legislatif yang dianggap layak tersebut adalah salah satunya anggota yang memiliki popularitas di masyarakat

Partai bukan hanya memiliki anggota dan mempersiapkan calon legislatif-calon legislatif terbaik. Tetapi, calon legislatif yang diberikan tanggung jawab besar dari partai untuk menjalankan aspirasi masyarakat. Perempuan yang menjadi anggota atau menjadi perwakilan sebagai anggota legislatif memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki.

Dalam proses memperoleh informasi pada partai ini memerlukan waktu karena berkaitan dengan narasumber yang ahli sehingga informasi lebih akurat. Dari setiap partai memiliki strateginya masing-masing untuk meningkatkan kuota perempuan. Wadah, fasilitas, dan dukungan dari partai menjadi suatu dorongan

dari pantai untuk para anggota partai atau calon legislatif dari partai tersebut.